



Strategi Pelayanan Pendidikan Inklusi di Sd Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Dhea Ayu Putri Hermawanti UPN "Veteran" Jawa Timur dheaayuputri140104@gmail.com +628885529313	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Shafina Sukma Indrayana UPN "Veteran" Jawa Timur shafinassukma@gmail.com +6285655774391	
Mayya Sobaroh UPN "Veteran" Jawa Timur mayyasobaroh@gmail.com +6285707271968	
Sadina Raffif Farrell Nawwardy Ubadah UPN "Veteran" Jawa Timur sadina.raffif.farrel@gmail.com +6285749939300	
Erwing Wahyu Millensyah UPN "Veteran" Jawa Timur erwing.wahyu.fisip@upnjatim.ac.id +6287731984080	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Hermawanti, D. A. P., Indrayana, S. S., Sobaroh, M., Ubadah, S. R. F. N., & Millensyah, E. W. (2025). Strategi Pelayanan Pendidikan Inklusi di Sd Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1007-1014.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pelayanan pendidikan inklusi di SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya sebagai sekolah dasar pelopor inklusi di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Strategi yang dianalisis mengacu pada teori strategi Donald C. Hambrick dan James Frederickson yang meliputi lima elemen: arena, vehicle, differentiator, staging, dan economic logic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah berkomitmen kuat menyediakan lingkungan pembelajaran inklusif melalui penyesuaian kurikulum, pelatihan guru, serta penyediaan fasilitas dasar bagi siswa berkebutuhan khusus. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan guru pendamping khusus (GPK), belum optimalnya kerja sama dengan psikolog atau terapis, serta keterbatasan media ajar khusus bagi siswa inklusi. Meskipun demikian, SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya tetap menjadi rujukan sekolah inklusi karena keberhasilannya menyatukan siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dalam satu ruang kelas tanpa diskriminasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kolaborasi lintas sektor, penyediaan GPK profesional, serta pelatihan berkelanjutan bagi

guru untuk memperkuat strategi pelayanan inklusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusi, Strategi Pelayanan, Siswa Berkebutuhan Khusus, Kebijakan

Abstract

This study aims to explore the inclusive education service strategies implemented at SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya, the pioneer inclusive elementary school in Surabaya. The research employs a qualitative descriptive approach with data collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis follows the steps of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The strategy framework is based on Donald C. Hambrick and James Frederickson's five elements: arena, vehicle, differentiator, staging, and economic logic. Findings reveal that the school is strongly committed to creating an inclusive learning environment through curriculum adjustments, teacher training, and the provision of basic facilities for students with special needs. However, challenges remain, including the absence of Special Education Support Teachers (GPK), limited collaboration with psychologists or therapists, and the lack of specific learning materials for inclusive students. Despite these obstacles, SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya serves as a model for inclusive education by integrating students with and without special needs in the same classroom without discrimination. The study recommends enhancing cross-sector collaboration, recruiting professional GPKs, and providing continuous training for teachers to strengthen more effective and sustainable inclusive education strategies.

Key Words: Inclusive Education, Service Strategy, Special Needs Students, Policy

A. Pendahuluan

Pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan yang menekankan kesetaraan hak belajar bagi semua anak, tanpa terkecuali dan tanpa memandang perbedaan dengan secara adil dan setara. Isu mengenai pendidikan inklusi berkembang menjadi diskusi politik dan selanjutnya diwujudkan dalam kebijakan yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang menjangkau seluruh peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus, sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan mereka. Di Indonesia, pendidikan inklusi bukan lagi konsep baru. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat dalam UUD 1945 Pasal 31, negara memiliki kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan bermutu bagi seluruh anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pendidikan inklusi juga menjadi bagian dari komitmen global melalui Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, harus mendapatkan hak sosial dan pendidikan yang berkualitas di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan (Arismunandar Syarif, 2024).

Anak berkebutuhan khusus memiliki beragam hambatan belajar dan perkembangan yang dapat berasal dari faktor internal (permanen) maupun eksternal (sementara). Mereka memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, baik karena hambatan maupun karena potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Keberagaman ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengklasifikasikan berbagai kategori peserta didik berkebutuhan khusus sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Beberapa contoh keberagaman Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) yaitu: (1) Peserta Didik dengan Hambatan Penglihatan/Tunanetra; (2) Peserta Didik dengan Hambatan Pendengaran/Tunarungu; (3) Peserta Didik dengan Hambatan Intelektual/Tunagrahita; (4) Peserta Didik dengan Hambatan Fisik Motorik/Tunadaksa; (5) Peserta Didik dengan Hambatan Emosi dan Perilaku; (6) Peserta Didik dengan Hambatan Lambat Belajar/*Slow Learner*; (7) Peserta Didik Berkesulitan Belajar Spesifik/*Specific Learning Disability*; (8) Peserta Didik Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa; (9) Peserta Didik Didik Autistic Spectrum Disorder/ASD; (10) Peserta Didik Attention Deficit Hyperactivity Disorder/ADHD (Arriani et al., 2022).

Pendidikan inklusi juga telah menjadi fokus utama dalam upaya pendidikan untuk semua di lembaga pendidikan reguler. Saat ini, Indonesia telah menyelenggarakan pendidikan inklusi mulai dari jenjang pendidikan dasar (SD) hingga pendidikan menengah atas (SMA). Namun, idealnya, pendidikan inklusi sebaiknya dimulai sejak jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal ini penting karena pada usia dini, anak-anak lebih responsif terhadap stimulasi

dibandingkan dengan usia yang lebih tua. Selain itu, pendidikan inklusi di Indonesia juga telah menunjukkan perkembangan signifikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) yang kini tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Namun, dalam penerapannya, masih ditemukan beberapa tantangan, khususnya terkait ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK). Dalam kebijakan yang terbaru, GPK sudah ditiadakan dan digantikan oleh Guru Kelas dari masing-masing siswa berkebutuhan khusus. Tidak adanya GPK atau keterbatasan jumlahnya menyebabkan banyak siswa berkebutuhan khusus tidak mendapatkan bimbingan yang optimal, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran maupun beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Mayoritas guru di sekolah inklusi berasal dari latar belakang pendidikan umum, bukan pendidikan (Abdul Hakim Hidayat et al., 2024). Akibatnya, banyak dari guru-guru yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk memahami karakteristik dan kebutuhan spesifik setiap siswa berkebutuhan khusus. Hal ini dapat menyulitkan dalam menyesuaikan metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kondisi anak. Namun, sebagai bentuk upaya terhadap kebijakan ini, seluruh guru kelas, terutama Guru Kelas 1 beserta Kepala Sekolah diberikan pelatihan khusus melalui program bimbingan teknis. Program ini bertujuan untuk membekali para pendidik dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dasar pendidikan inklusi, strategi pembelajaran yang efektif, serta teknik adaptasi kurikulum bagi siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, seperti aksesibilitas fisik, alat bantu, serta kurikulum yang adaptif. Padahal, penyediaan fasilitas dan infrastruktur menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusi (Suvita et al., 2022). Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting bagi anak-anak berkebutuhan khusus karena mereka memerlukan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung dalam proses pembelajaran. Setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga sekolah inklusi harus menyediakan berbagai jenis media pembelajaran yang beragam (Bella Karmelia et al., 2024).

Kebijakan untuk menerima siswa berkebutuhan khusus di Kota Surabaya sudah ada sejak 1989. Jumlah siswa berkebutuhan khusus di Kota Surabaya pada jenjang sekolah dasar mencapai 1.978 siswa pada tahun 2025 (data Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2025). Sebelum adanya Permendikbud Nomor 48 Tahun 2023, hanya terdapat 50 Sekolah Dasar (SD) di Kota Surabaya yang menerima siswa berkebutuhan khusus. Namun, setelah peraturan tersebut diberlakukan, seluruh SD di Surabaya diwajibkan untuk menyediakan fasilitas dan bangku bagi siswa berkebutuhan khusus, sehingga kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang setara semakin luas dan merata. Salah satu sekolah dasar tersebut adalah SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya. Selain itu, SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya juga tercatat sebagai sekolah dasar pertama di Kota Surabaya yang menerima peserta didik inklusi. Komitmen awal yang kuat ini menjadikan sekolah tersebut sebagai rujukan atau contoh bagi sekolah lain dalam mengembangkan layanan pendidikan inklusi.

Saat ini, SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya memiliki total 744 siswa, yang terdiri dari 679 siswa reguler dan 65 siswa berkebutuhan khusus. Adapun rincian jumlah siswa berkebutuhan khusus dan siswa reguler di setiap kelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Siswa SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya

Kelas	Jumlah ABK	Jumlah Normal
1	6	109
2	13	103
3	11	112
4	14	128
5	8	114
6	13	113
Total	65	679

Sumber: Data diolah penulis

Dari data tersebut, terlihat bahwa SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya mencerminkan komitmen sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang ramah terhadap keberagaman, baik dari segi kemampuan maupun latar belakang individu. Adapun jenis kebutuhan khusus yang dimiliki oleh para siswa mencakup berbagai kategori, seperti tunanetra (gangguan penglihatan), tunagrahita (keterbelakangan mental), dan tunadaksa (gangguan fisik/motorik).

Selain itu, terdapat pula siswa dengan hambatan emosi dan perilaku, siswa dengan kemampuan belajar yang lambat (*slow learner*), serta mereka yang mengalami kesulitan belajar spesifik seperti disleksia dan diskalkulia. SD Negeri Klampis Ngasem I Surabaya juga menerima peserta didik dengan kecerdasan dan bakat istimewa, serta siswa dengan kondisi seperti *Autistic Spectrum Disorder (ASD)* dan *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)*.

Keberagaman karakteristik siswa ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pihak sekolah dalam menerapkan strategi pelayanan pendidikan inklusi yang tepat dan adaptif. Hal ini tidak hanya menuntut adanya penyesuaian dalam metode pembelajaran, tetapi juga kesiapan dari segi sumber daya manusia, seperti kompetensi dan peran strategis guru dalam memberikan pelayanan terhadap siswa inklusi. Dengan kondisi tersebut, SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya dapat menjadi contoh konkret bagaimana sekolah dasar reguler mampu mengimplementasikan pendidikan inklusi secara nyata dan berkelanjutan. Tujuan adanya pendidikan inklusi adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, atau sosial, serta yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, agar dapat memperoleh pendidikan bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya (Budiyanto, 2017). Selain itu, penerapan pendidikan inklusi menekankan bahwa seluruh siswa dapat diterima tanpa diskriminasi, sehingga menciptakan bentuk pelayanan kesetaraan pendidikan. Dengan menerapkan pendidikan inklusi, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang ramah dan hangat, di mana semua peserta didik merasa nyaman dan dihargai tanpa memandang perbedaan latar belakang atau kondisi mereka. Hal ini juga membantu menumbuhkan rasa toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan di antara peserta didik, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih harmonis di masa depan (Hanifah Salma et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pelayanan pendidikan inklusi di SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai **“Strategi Pelayanan Pendidikan Inklusi di SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya”**.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian sebagaimana adanya (Samsu, 2021). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi pelayanan pendidikan inklusi di SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya serta memperoleh data yang kaya tentang kepuasan, tantangan, dan harapan masyarakat terhadap layanan ini dengan bertujuan memberikan rekomendasi dan manfaat bagi peningkatan layanan dan kebijakan pendidikan inklusi di Kota Surabaya. Lokasi penelitian difokuskan pada SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya dan dilaksanakan selama enam bulan, dari Februari hingga Agustus 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan langsung di sekolah untuk mendapatkan gambaran nyata di lapangan (Khasanah, 2020). Wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam dari informan, dan dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk mengambil informasi dari informan yang dianggap ahli (Kumara, 2018), sedangkan *accidental sampling* memungkinkan peneliti bertemu langsung dengan narasumber di lokasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dengan pihak sekolah, siswa, wali murid, dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Data sekunder berasal dari dokumen resmi, kebijakan pemerintah, dan artikel jurnal. Informan utama mencakup guru pendamping khusus, siswa berkebutuhan khusus, wali murid, dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Data dianalisis melalui empat tahapan yaitu akumulasi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan membandingkan persepsi siswa, wali murid, dan guru pendamping terhadap kualitas layanan pendidikan inklusi, guna mengidentifikasi kesenjangan dan menyimpulkan efektivitas strategi pelayanan inklusi di SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya.

C. Hasil dan Pembahasan

Penyediaan bangku bagi siswa inklusi di SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya menjadi tantangan yang cukup kompleks, apalagi sekolah tersebut menjadi sekolah pertama yang menyediakan bangku bagi siswa inklusi di Surabaya. Melalui Permendikbudristek No. 48 Tahun

2023 yang berisi tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, maka Dinas Pendidikan Kota Surabaya berusaha memberikan tempat terbaik bagi siswa inklusi di Kota Surabaya. Dengan adanya program tersebut, maka dibutuhkan strategi guna mewujudkan optimalisasi pelayanan pendidikan bagi siswa inklusi dan menjamin siswa inklusi mendapat pendidikan yang berkualitas. Strategi itu dirancang dengan harapan para wali murid tidak perlu merasa risau dan seluruh siswa merasa nyaman untuk menempuh pendidikan di SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya. Dalam penyusunan strategi untuk memberikan pelayanan pendidikan yang optimal bagi seluruh siswa penyandang disabilitas diperlukan rencana yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pada penanganan ini, diperlukan teori strategi menurut (Hambrick & Fredrickson, 2001) yang menjelaskan bahwa bagaimana strategi dari menerjemahkan Visi sampai pada tindakan melalui 5 (lima) elemen strategi. dengan model strategi tersebut target pencapaian mutu (Key Performance Indicator) mudah teridentifikasi dan terukur. Maka dari itu, berikut ini merupakan analisis indikator strategi Pelayanan Pendidikan Inklusi Di SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya, yaitu:

1. Arena

Arena merujuk pada ruang lingkup atau fokus utama dari strategi yang dijalankan. Dalam konteks pelayanan pendidikan inklusi, arena mencakup pada jenjang pendidikan dasar yang disediakan oleh sekolah, seperti SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya, serta kelompok siswa yang menjadi sasaran, yaitu siswa berkebutuhan khusus. Sejak diberlakukannya kebijakan pendidikan inklusi di Kota Surabaya pada tahun 2008, dan diperkuat oleh Permendikbud No. 48 Tahun 2023 yang mewajibkan semua sekolah formal menerima peserta didik berkebutuhan khusus, SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya dapat dikatakan telah berada selangkah lebih maju dibanding sekolah lain karena sudah memiliki pengalaman dan fondasi pelayanan inklusi sebelumnya. Selain itu, juga dapat dilihat dari komitmen sekolah untuk tidak hanya menerima siswa inklusi, tetapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang suportif dan non-diskriminatif.

Strategi ini juga memberikan keunggulan kompetitif tersendiri dibandingkan sekolah-sekolah lain yang mungkin belum siap mengimplementasikan pendidikan inklusi secara menyeluruh. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama terletak pada proses pemberian materi pembelajaran di kelas. Karena siswa reguler dan siswa inklusi berada dalam satu kelas yang sama, guru kelas memiliki beban ganda untuk membagi perhatian dan strategi mengajar. Guru tidak dapat hanya berfokus pada siswa reguler atau siswa inklusi saja, melainkan harus mampu menyeimbangkan pendekatan agar seluruh siswa dapat menerima pembelajaran secara efektif. Hal ini tentu memerlukan keterampilan khusus, serta waktu dan energi yang lebih besar dari pihak guru.

2. Vehicle

Salah satu hal penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusi adalah penentuan kriteria peserta didik baru berkebutuhan khusus (ABK) yang akan diterima oleh sekolah. Kriteria ini tidak hanya dilihat dari kondisi anak, tetapi juga disesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan sekolah dalam memberikan layanan yang sesuai. Dalam hal ini, vehicle berperan sebagai sarana atau cara yang digunakan sekolah untuk memastikan bahwa proses penerimaan peserta didik baru berjalan dengan tepat. Selain itu, Vehicle indikator penting terkait sejauh mana sarana program tersebut untuk mencapai tujuan. Dari hasil observasi, pihak sekolah telah menyediakan jalur kursi roda bagi penyandang tuna daksa. Jalur kursi roda yang dibuat landai menunjukkan bahwa sekolah benar-benar berusaha untuk memberikan sarana yang baik bagi seluruh pengguna jalur. Selain itu, dalam praktik pembelajaran guru telah memberikan berbagai penyesuaian dalam pembelajaran, seperti menyederhanakan materi, memberikan contoh yang lebih sederhana, memperbanyak media visual, serta mengulang penjelasan jika diperlukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode belajar yang diaplikasikan kepada siswa berkebutuhan khusus adalah fleksibel. Dalam proses pembelajaran, SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya tidak memiliki buku khusus bagi siswa inklusi, padahal buku menjadi penunjang utama bagi perkembangan siswa inklusi. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pihak sekolah belum optimal dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi siswa inklusi.

Untuk menciptakan sarana yang memadai bagi siswa berkebutuhan khusus, Dinas Pendidikan Kota Surabaya melakukan kerja sama demi mewujudkan tujuan pada indikator Vehicle. Namun, dari hasil observasi dan wawancara, Dinas Pendidikan Kota

Surabaya belum melakukan kerja sama dengan optimal bersama tenaga ahli dibidangnya. Sebagai contoh adalah penyediaan Unit Layanan Sisabilitas (ULD) yang belum banyak sehingga masih dibentuk rombel. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Surabaya belum efektif dalam memberikan pelayanan untuk mengetahui tumbuh kembang siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, pihak sekolah SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya belum menjalin kerja sama dengan tenaga ahli psikolog atau terapis, sehingga tidak ada *assessment* yang dapat memberikan diagnosis yang tepat terkait perkembangan anak. Hal ini mengakibatkan sekolah tidak memiliki data yang akurat mengenai kondisi dan kebutuhan spesifik siswa berkebutuhan khusus.

3. Differentiator

Merujuk pada teori strategi pelayanan menurut (Hambrick & Fredrickson, 2001) suatu strategi pelayanan harus memiliki Differentiator dalam hal ini berupa hal-hal unik yang membuat sekolah tersebut berbeda dan lebih unggul dibandingkan sekolah lain. Pendidikan di SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya memiliki perbedaan yang membedakannya dari Sekolah Luar Biasa (SLB). SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya telah menegaskan diri sebagai pelopor pendidikan inklusi. Bahkan, sekolah ini kerap dijadikan tempat studi banding oleh lembaga lain, termasuk dari luar negeri. Ini memperlihatkan posisi strategis sekolah yang bukan hanya pelaksana, tetapi juga menjadi rujukan dalam praktik pendidikan inklusi yang baik.

Keunggulan lainnya terletak pada keberagaman peserta didik yang diterima, mulai dari tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, hingga anak dengan spektrum autisme, slow learner, dan ADHD, yang menunjukkan kapasitas adaptif sekolah dalam menyusun kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai, serta di SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya yang menjadi pembeda yaitu menggabungkan kelas antara siswa berkebutuhan khusus dan siswa (Izzati & Sujarwanto, 2015). Perbedaan paling mencolok antara SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya dan SLB adalah bahwa SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya tidak memungut biaya sekolah, sementara SLB masih mengenakan biaya pendidikan, namun juga sekolah ini tidak serta-merta menerima semua siswa berkebutuhan khusus seperti halnya SLB, melainkan mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, dan sosial anak agar proses pembelajaran tetap efektif dan tidak mengganggu dinamika kelas secara (Astuti & Putri, 2024) tersebut mencerminkan strategi pelayanan inklusi yang mempertimbangkan prinsip keadilan sekaligus efektivitas pembelajaran dua prinsip utama dalam pendidikan inklusif sebagaimana dijelaskan dalam (Reid, 2020).

Sebagai bagian dari upaya mendukung keberhasilan pendidikan inklusi di Surabaya, SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya menunjukkan karakteristik yang membedakannya dari sekolah dasar lainnya, terutama dalam hal layanan inklusi. Sekolah ini berupaya menjadi model penyamarataan kualitas layanan pendidikan dasar, khususnya dalam menangani kasus bullying terhadap siswa inklusi dan dalam penguatan kompetensi guru. Banyak orang tua memilih untuk mendaftarkan anaknya di SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya karena sekolah ini dikenal memiliki pengalaman yang panjang dan konsisten dalam memberikan layanan inklusi yang optimal.

4. Staging

Staging merupakan suatu pendekatan sistematis yang merujuk pada serangkaian tahapan terstruktur yang dirancang secara bertahap untuk meningkatkan mutu suatu lembaga atau organisasi. Di SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya sendiri, peningkatan kualitas sekolah dilakukan melalui proses bertahap yang disusun dengan perencanaan yang matang dan terarah. Upaya peningkatan ini dimulai dari perbaikan pada aspek-aspek dasar, seperti pada penguatan kapasitas guru, khususnya dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Strategi awal yang digunakan adalah strategi peningkatan kualitas pendidikan inklusi telah dimulai dengan pelatihan guru kelas sebagai langkah awal. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap karakteristik siswa berkebutuhan khusus, serta untuk membekali mereka dengan pendekatan pembelajaran yang adaptif dan diferensiatif. Tahapan ini mencerminkan bentuk *initial staging*, yaitu langkah pertama dalam proses transformasi sistem pembelajaran menuju sistem yang lebih inklusif.

Namun, pelaksanaan tahap awal tersebut dinilai belum optimal, karena pelatihan yang diberikan hanya berlangsung dalam durasi yang relatif singkat dan belum diikuti oleh sistem pendukung yang memadai. Sebagaimana diungkapkan oleh pihak Dinas

Pendidikan, tidak adanya Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah reguler saat ini merupakan konsekuensi dari pengalihan GPK ke guru kelas reguler yang menyebabkan kekosongan peran penting dalam mendampingi siswa inklusi di sekolah reguler. Seharusnya pemerintah perlu meratakan GPK terlebih dahulu sebelum membuat program seluruh sekolah wajib menerima siswa berkebutuhan khusus, karena siswa berkebutuhan khusus memerlukan *treatment* yang berbeda dengan siswa reguler. Siswa berkebutuhan khusus juga tidak memiliki buku khusus yang digunakan dalam pembelajaran. Hal tersebut membuat tugas wali kelas semakin bertambah, pembelajaran yang digabung antara siswa reguler dan siswa inklusi tentu membuat fokus menjadi terbagi. Wali kelas juga memiliki tugas tambahan untuk memodifikasi kurikulum sesuai dengan kemampuan siswa yang ada di kelas.

5. Economic Logic

Economic logic menjelaskan bagaimana strategi menciptakan nilai yang tidak hanya secara finansial, tetapi juga nilai sosial dalam konteks pelayanan publik. Economic Logic menggambarkan apa yang bisa diperoleh organisasi ketika mereka berhasil memberikan manfaat yang baik bagi pengguna kebijakan ini. Dalam konteks ini, Economic Logic digunakan untuk mengkaji bagaimana kontribusi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam menyediakan layanan pendidikan yang tidak hanya berkualitas terhadap seluruh siswa reguler, namun juga kepada siswa berkebutuhan khusus di Kota Surabaya, seerta manfaat bagi walimurid selaku penerima layanan. Oleh karena itu, peneliti dapat mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana program ini benar benar memberikan dampak yang nyata dan positif terhadap penerima kebijakan tersebut. Hasil evaluasi ini akan memberikan masukan strategis bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk menyusun langkah-langkah perbaikan atau inovasi kebijakan agar program yang dilaksanakan menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kebijakan untuk menerapkan kepada seluruh sekolah dasar di Kota Surabaya untuk menerima siswa berkebutuhan khusus, merupakan program yang sangat bermanfaat sekali. Hal tersebut dikarenakan dari siswa berkebutuhan khusus menjadi tidak *minder* terhadap sesama siswa yang lain. Walimurid dari siswa berkebutuhan khusus juga merasakan perubahan yang lebih baik dari anaknya, dimana perkembangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa walimurid tersebut menyekolahkan anaknya di SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya. Melalui pendidikan inklusi, dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial, dan diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang ramah, nyaman dan menghargai perbedaan serta menumbuhkan sikap toleransi sejak dini.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa SD Negeri Klampis Ngasem 1 Surabaya merupakan pelopor pendidikan inklusi di Surabaya dengan membuka kesempatan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus bersama siswa reguler. Dalam pelaksanaannya, sekolah menerapkan berbagai strategi, termasuk penggunaan kurikulum yang dimodifikasi, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, serta pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi pengajaran inklusif. Namun, sekolah masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum adanya kolaborasi dengan psikolog atau terapis profesional yang menyebabkan kurangnya asesmen perkembangan siswa ABK, serta terbatasnya ketersediaan buku ajar khusus. Keunggulan sekolah ini terletak pada komitmen historisnya dalam melayani siswa berkebutuhan khusus dan pendekatan pembelajaran yang adaptif tanpa membedakan perlakuan antara siswa reguler dan berkebutuhan khusus. Meskipun telah melakukan perbaikan bertahap, seperti peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan penyesuaian kurikulum, pelatihan yang diberikan masih bersifat jangka pendek dan belum merata, sehingga guru kelas merangkap menjadi guru pendamping khusus. Hal ini mengakibatkan pembagian perhatian yang kurang optimal dalam proses pembelajaran. Pelayanan pendidikan inklusi di sekolah ini memberikan manfaat bagi orang tua dan siswa berkebutuhan khusus dengan membantu pengembangan potensi sosial dan akademik di lingkungan sekolah reguler, sekaligus mendukung terwujudnya pemerataan pendidikan yang inklusif dan non-diskriminatif.

E. Referensi

- Abdul Hakim Hidayat, Anisa Rahmi, Nyai Ai Nurjanah, Yusuf Fendra, & Wismanto Wismanto. (2024). Permasalahan Penerapan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 102–111. <https://doi.org/10.62383/hardik.v1i2.189>
- Arismunandar Syarif, R. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Implementasi di Sekolah Menengah. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 6(3), 852–864.
- Arriani, F., Agustiyawati, & Rizki, A. (2022). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.
- Astuti, R. F., & Putri, K. A. (2024). Peran Pendidikan Inklusif: Strategi dan Tantangan dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Anak-Anak Berkebutuhan Khusus. 8(2), 109–119. <https://doi.org/10.24036/jpkk.v8i2.926>
- Bella Karmelia, Anisatul Khoiriyah, Anggraini Anggraini, & Hendri Marhadi. (2024). Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Untuk Mendukung Diversitas Siswa Pada Sekolah Inklusi. *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 188–198. <https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i2.810>
- Budiyanto. (2017). *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Pranata Media.
- Hambrick, D. C., & Fredrickson, J. W. (2001). Are you sure you have a strategy? *Academy of Management Executive*, 15(4), 51–62.
- Hanifah Salma, D., Haer, A. B., Widuri, S., & Santoso, B. (2021). Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Dalam Menjalani Pendidikan Inklusi Di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 473–483.
- Izzati, R. S., & Sujarwanto. (2015). Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Disekolah Dasar Inklusif. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 1–8.
- Khasanah, U. (2020). *Pengantar MicroteachinG* (1st ed.). Penerbit Deepublish.
- Kumara, A. R. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Reid, G. (2020). *Dyslexia and Inclusion* (3rd ed.). Routledge.
- Samsu. (2021). *Metode Penelitian: Teori & Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research and Development* (Rusmini, Ed.; 2nd ed.). Pusaka Jambi.
- Suvita, Y., Manullang, T. I. B., Sunardi, S., & Supriatna, M. (2022). Kelengkapan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 6(2), 155–164. <https://doi.org/10.24036/jpkk.v6i2.601>